



Rancangan pergub APBD DKI Diteken 10

April

RANCANGAN Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat disahkan Kementerian Dalam Negeri 10 April.

"Mungkin juga sebelum 10 April bisa saya teken," ungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat dihubungi *Media Indonesia*, kemarin.

Optimisme Tjahjo dilandasi evaluasi atas rancangan anggaran DKI telah disepakati bersama antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan pihak DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

"Intinya kita ingin keberpihakan anggaran daerah

terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Kamis (2/4), dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Kemendagri yang diwakili Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek dengan Gubernur Basuki dan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dengan anggota Badan Anggaran DPRD.

Anggaran pembangunan minim dari evaluasi. Reydonnyzar Moenek menilai ada belanja-belanja tidak proporsional seperti borosnya belanja pegawai yang seharusnya bisa dialokasikan

untuk kepentingan publik, misalnya pendidikan dan infrastruktur.

"Karena kita pernah perbandingan untuk belanja pegawai sebesar Rp19,8 triliun, tapi untuk penanggulangan banjir hanya Rp5,3 triliun," ujar Donny, sapaan Reydonnyzar, di Gedung F Kementerian Dalam Negeri, Kamis (2/4).

Donny membandingkan, pada 2014, sebanyak 40% APBD DKI untuk belanja infrastruktur, tetapi dalam RAPBD 2015 justru turun menjadi 30%. Kemendagri mengusulkan alokasinya diperbesar untuk penanggulangan banjir dan pelebaran jalan layang. Belanja pegawai

dinilai belum proporsional bila dihitung dari kewajiban dan kepatutannya. Donny menjelaskan kondisi fiskal Pemda DKI tinggi, tapi tidak hanya untuk memperbesar belanja pegawai. Karena itu, tunjangan pegawai akan dirasionalkan untuk infrastruktur seperti pelebaran jalan, pengerukan sungai, pemberihan sampah.

"Rp4,1 triliun untuk belanja jasa kantor. Beli meja lagi, komputer lagi. Sementara itu, untuk jalan cuma Rp2,9 triliun. Kan tidak rasional," imbuh Donny.

Kemendagri juga mencoret tunjangan transportasi bagi pegawai negeri sipil DKI. Besaran penerimaan pajak

hiburan di DKI dinilai juga tidak sesuai dengan jumlah tempat hiburan di Jakarta. Pajak hiburan yang didapat hanya Rp1 triliun.

Dalam menanggapi hasil evaluasi itu, Ahok mengaku banyak kendala teknis di lapangan. Pembahasan RAPBD 2015 *deadlock* sehingga peraturan daerah gagal ditetapkan.

Kemendagri menjadi penengah agar pembahasan berjalan mulus. Prasetyo Edi Marsudi berkomitmen melakukan koordinasi kembali.

"Kami siap mengawasi pelaksanaan APBD. Eksekutif dan legislatif adalah mitra sederajat," kata dia. (ind/Ssr/J-3)